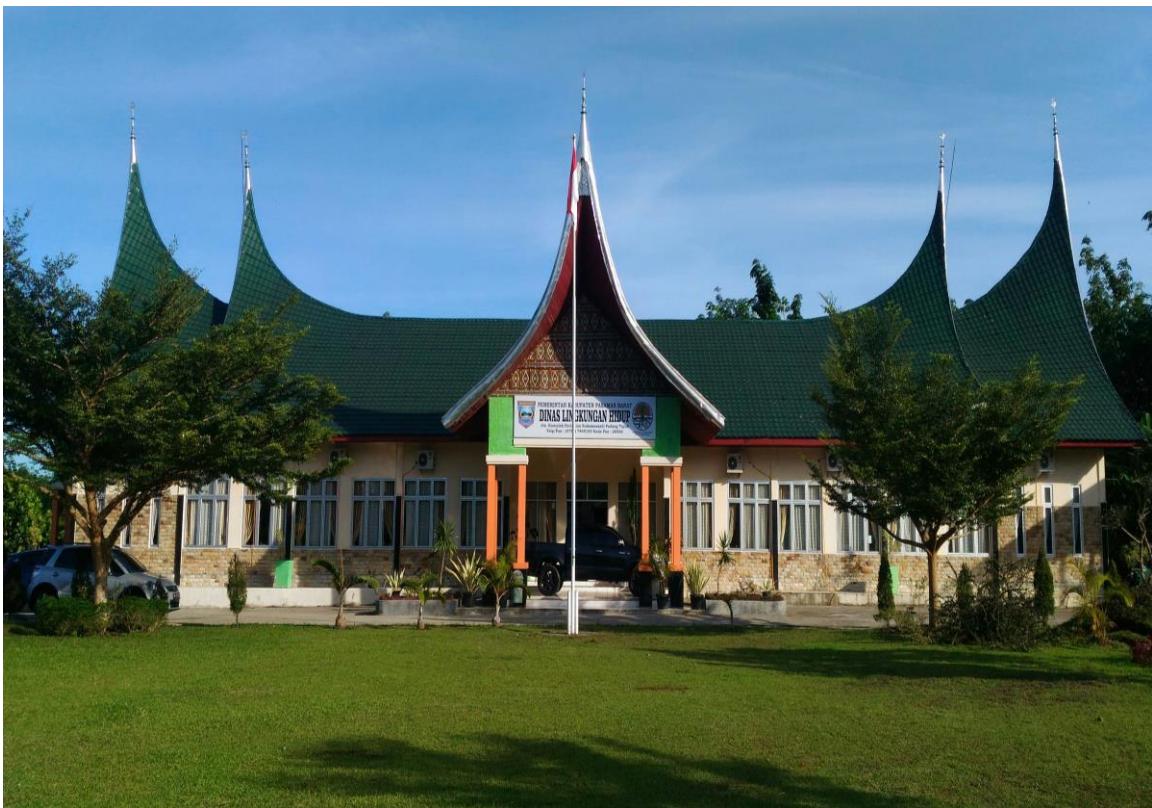




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan arah kebijakan dan strategi SKPD 5 tahunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen Renstra menjadi perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja DLH tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, yang memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 5 tahun serta penjabarannya ke dalam program dan anggaran tahunan. Tujuan

DLH yang termuat di dalam dokumen renstra dimaksud adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan sasaran strategis : 1) optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan. Program dan kegiatan mengacu pada KepMendagRI Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedoman oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta DLH Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

19. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/583/BUP-PASBAR/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi dinas sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup dan kehutanan, baik Bidang Penataan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peningkatan Kapasitas; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun Bidang Kehutanan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja DLH Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif

- dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
 - 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
 - 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai pada tahun 2021 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sudah mengacu dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Di dalam pelaksanaannya Renja Dinas LH Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas LH Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 9 program, 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan perincian: 1 program penunjang urusan (7 kegiatan dan 16 sub kegiatan) dan 8 program urusan lingkungan hidup (9 kegiatan dan 11 sub kegiatan). Sementara itu alokasi anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.11.068.894.828,89 dan target pendapatan daerah yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.150.000.000 (dari retribusi pelayanan persampahan).

Komponen pada program penunjang urusan umumnya berada pada dan dikelola oleh Sekretariat Dinas LH. Kegiatan dan sub kegiatan pada program ini pada umumnya bersifat pendukung untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan urusan LH, misalnya seperti penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan SKPD, pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultansi, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan sarana/prasarana umum dan lain-lain. Sementara itu untuk 8 program, 9 kegiatan dan 11 sub kegiatan urusan lingkungan hidup terealisasi secara fisik dengan capaian 100% sesuai yang ditargetkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 9 program yang terdiri dari 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH pada tahun sebelumnya serta yang akan datang

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DLH sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja DLH pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DLH dan Pencapaian Renstra DLH s.d. Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Th 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S.D. Tahun 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021			Target Progra m Dan Kegiat an (Renja OPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S.D. Tahun 2022			
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)		
2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	5 kecamat an	2 kecamata n	3 kecamata n	2 kecamata n	66,67 %	3 kecam a-tan	3 kecamata n	90 %
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	40 %	27,75 %	30 %	27,58	91,93 %	40 %	27,19	67,97 %
			Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (IL) dan IPPLH	56 objek	47 objek	49 objek	40 objek	81,63 %	40 objek	30 objek	75 %
			Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah objek yang diawasi dan dibina	56 objek	47 objek	40 objek	40 objek	100 %	30 objek	30 objek	100 %
			Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Persentase pengkajian dampak lingkungan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Kegiatan Pembinaan sekolah berbasis lingkungan hidup (adiwiyata)	Jumlah sekolah Adiwiyata yang terbina			6 sekolah	6 sekolah	100 %	-	-	-

2	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor, sumber mata air dan kawasan mangrove	32 %	15 %	15 %	15 %	100 %	15 %	15 %	100 %
			Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina			4 kampung iklim					
2	5	20	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Kualitas Air	80	80	80	80	100 %	80	80	100 %
				Indeks Kualitas Udara	90	92,77	90	93,86	104,29 %	90	92	102,22 %
			Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah objek pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri			15 objek		-	-	-	-
			Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah objek pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair			25 objek	-	-	-	-	-
			Kegiatan Pengujian kualitas air sungai	Jumlah sungai yang diuji kualitasnya			2 sungai	2 sungai	100%	2 sungai	2 sungai	100%

2	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	6 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100 %	6 lokasi	6 lokasi	100 %
			Kegiatan Pemeliharaan RTH	Lokasi RTH yang dipelihara	6 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100 %	5 lokasi	5 lokasi	100%
2	5	17	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase PJU dalam Kondisi Baik	93 %	86,14 %	90 %	90 %	100 %	Pindah ke Dishub	Pindah ke DISHUB	Pindah ke DISHUB
2	5	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	Level 3	100 %
				Skoring Penilaian LKj/SAKIP	B	B	B	B	100 %	B	B	100 %
				Skoring penilaian LPPD	-	-	3,06	3,06	100 %	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit

		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	5	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	-	-
		Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	-
2	5	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat	5 orang	5 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
		Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat	5 orang	5 orang	6 orang				

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Tujuan DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Realisasi dan Target Capaian Tahunan					
		Realisa si 2016	Realisa si 2017	Realisa si 2018	Realisa si 2019	Realisa si 2020	Realisa si 2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,61	69,91	71,05	70,89	70,84	66,85
2	Persentase sampah yang tertangani	28,16	28,0	27,88	27,75	27,58	27,50

Sumber : DLH Kab. Pasaman Barat

Capaian indikator kinerja sasaran strategis terciptanya lingkungan hidup berkualitas adalah sebesar $\frac{66,85}{68,20} \times 100\% = 98,02\%$

termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”

Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya Pasaman Barat yang bersih dari sampah adalah sebesar $\frac{28,0}{27,5} \times 100\% = 98,21\%$

termasuk kategori keberhasilan “**memuaskan**”.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 9 (sembilan) Program yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dimana relisasi pencapaian target dan sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut sesuai Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLH Tahun 2016-2021, yaitu :

**Tabel 2.2
Penilaian Capaian Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	68,20	66,85	98,02	Tercapai
2. Indeks Kualitas Air (IKA)	-	55,79	50	89,62	Tercapai
3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	90,23	93,43	103,55	Tercapai
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	48,76	46,65	95,67	Tercapai
5. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	92,85	92,85	100	Tercapai

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
6. Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	Tercapai
7. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	%	100	100	100	Tercapai
8. Dokumen yang disusun (KLHS RTRW)	Dok	1	0	0	Tidak Tercapai
9. Penghargaan Sekolah Adiwiyata	-	1	1	100	Tercapai
10. Penghargaan Kalpataru	-	1	0	0	Tidak Tercapai
11. Penghargaan PROPER Daerah	-	5	0	0	Tidak Tercapai
12. Penetapan hak MHA terkait PPLH yang berada di daerah kab/kota	-	0	0	0	Tercapai
13. Cakupan Wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	Kec	3	3	100	Tercapai
14. Persentase sampah yang tertangani	%	28,0	27,50	98,21	Tercapai
15. Peningkatan Nilai SAKIP	-	B	B	100	Tercapai
16. Peningkatan Level maturitas SPIP	Level	3	3	100	Tercapai
17. Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	%	30	30	100	Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja DLH Kab Pasaman Barat Tahun 2021

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan pada materi teknis RTRW Kabupaten Pasaman Barat sehingga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW juga belum dapat dituntaskan penyusunannya pada tahun 2021 dan akan dianggarkan kembali pada tahun 2022.

2. Tidak adanya kegiatan pembinaan dan penilaian penghargaan Adiwiyata/Proper/Kalpataru tingkat Kabupaten Pasaman Barat akibat keterbatasan anggaran pasca Covid 19.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada masa-masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganggarkan kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat mendukung Pencapaian Misi Ke-VI (ke enam) yakni :

Tabel 2.2.1.

**Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2021**

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan DLH
Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola Sumber Daya Alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam sesuai penataan ruang dan berwawasan lingkungan	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Uraian tugas pokok dan fungsi DLH dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala DLH yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian target kinerja DLH Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2022 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kab. Pasaman Barat

No	Indikator	SPM / stand ar nasio -nal	IKK	Target Renstra DLH						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahu n 2017	Tahu n 2018	Tahu n 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Targe t 2022	Realis asi 2022	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			69,61	69,91	71,05	70,89	70,84	66,85	68,74	71,50	
2	Persentase sampah yang tertangani			28,16	28,0	27,88	27,75	27,58	27,50			
2	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan			87 %	88 %	89 %	90 %		92,85	92,85 %	92,85 %	
3	Jumlah Penghargaan lingkungan tingkat propinsi dan nasional yang diperoleh			2	3	5	7		1	1	1	
4	Level Maturitas SPIP			NA	Level 3	Level 3	Level 3			Level 3	Level 3	
5	Opini terhadap laporan keuangan OPD			NA	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	
6	NILAI SAKIP			NA	B	B	B			B	B	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dinas lingkungan hidup kabupaten pasaman barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada, baik Truck sampah, Becak sampah maupun kontainer sampah sehingga belum optimalnya kinerja pelayanan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Permasalahan sertifikasi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum tuntas sehingga menjadi penghalang untuk proses pengajuan proposal bantuan pembangunan fisik melalui dana APBN.
- 3) Minimnya anggaran untuk mengoptimalkan kinerja laboratorium lingkungan DLH Kabupaten Pasaman Barat sehingga kita masih menggunakan jasa laboratorium terakreditasi di Kabupaten/ Kota lain di Sumatera Barat.
- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, misalnya dalam hal penanganan sampah, perlindungan tanaman dan hutan, serta upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2023 membutuhkan dana sebesar **Rp.7.044.454.173** (*Tujuh milyar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang akan dialokasikan untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) program; 18 (delapan belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan DLH dengan mengacu pada Renstra DLH 2021-2026.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup untuk Rencana Kerja Tahun 2023 tidak melakukan kegiatan Forum OPD karena tidak adanya daftar usulan masyarakat melalui Musrenbang dari Kecamatan.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7,044,454,173					7,171,871,087			
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,933,431,950					5,081,434,908			
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35,116,200					36,872,010			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaam	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	35,116,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	36,872,010
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,327,833,595					4,329,739,652			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	39 Orang/bulan	100 %	4,110,450,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	100 %	4,103,239,652
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	138,383,095	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	100 %	147,000,000
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	79,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	100 %	79,500,000
2	11	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					64,722,500					70,849,153			
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	589 unit	36,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	37,500,000
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	589 unit	27,822,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	33,349,153
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah					40,130,000					33,513,095			
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Level Maturitas SPIP Peningkatan Nilai SAKIP DLH Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bintek/Diklat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 BB 0 50 %	70 Orang	14 orang	40,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Maturitas SPIP Peningkatan Nilai SAKIP DLH Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	30 BB 0 50 %	33,513,095
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					225,379,655					243,285,343			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	5,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.0.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.0.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target					
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	40,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	27,500,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Laporan	100 %	155,379,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	170,285,343
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							74,000,000						88,000,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	57,000,000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	31,000,000
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							166,250,000						279,175,655	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	37 Unit	57 Unit	91,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	100,000,000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	15 Unit	57 Unit	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	19,000,000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	34 Unit	57 Unit	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	41,000,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	2 Unit	57 Unit	16,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	119,175,655
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							438,988,850						152,887,735	
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							138,988,850						152,887,735	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya Dokumen RPPLH	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	138,988,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen RPPLH	1 Dokumen	152,887,735	
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							300,000,000					0	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300,000,000				0	
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							108,335,451					119,168,997	
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							108,335,451					119,168,997	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.99 dan 90.45 Indeks	1 Dokumen 6 lokasi	69.27 Indeks	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks	38,400,000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Pembinaan Program Kampung Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.99 dan 90.45 Indeks	1 Dokumen 3 lokasi	69.27 Indeks	11,835,451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks	10,018,997
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.99 dan 90.45 Indeks	1 Dokumen	69.27 Indeks	62,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks	70,750,000
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							287,807,344					316,588,078	
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							287,807,344					316,588,078	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.7 Indeks 52.93 Indeks	46.7 Indeks	52.93 Indeks	287,807,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46.7 Indeks 52.93 Indeks	316,588,078
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							49,500,000					54,450,000	
2	11	05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3							49,500,000					54,450,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3 Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 93 %	1 Laporan	100 %	49,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3 Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100 % 93 %	54,450,000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						114,950,000					126,445,000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						114,950,000					126,445,000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	3 Dokumen	93 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %	12,000,000
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti diklat PPLHD	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Orang	93 %	15,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %	25,545,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	38 Laporan 49 objek	93 %	89,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %	88,900,000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						27,500,000					30,250,000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						10,000,000					11,000,000	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Angka 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	5 Angka 1 Dokumen	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH										17,500,000				19,250,000
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,27 0	1 Dokumen	1 Dokumen	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,27 0	19,250,000		
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										27,500,000				30,250,000
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										27,500,000				30,250,000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga pendidikan/filantropi dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Penghargaan 18 Penghargaan	18 Entitas	25 Penghargaan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan	25 Penghargaan 18 Penghargaan	30,250,000		
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										73,323,250				80,655,575
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										73,323,250				80,655,575
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	73,323,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	80,655,575	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										983,117,328				1,179,740,794
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah										983,117,328				1,179,740,794
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Persentase sampah yang tertangani	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	4 Kecamatan 28.5 %	48 Ton 28.5 %	28.5 %	983,117,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	4 Kecamatan 28.5 %	1,179,740,794	
TOTAL												7,044,454,173				7,171,871,087		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Adapun sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan prioritas pembangunan Propinsi terletak pada program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi “Sakato Plan”.

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2019 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisik ozon, dan lain-lain). (4) Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLHK 2020–2024, sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasaman Barat 2016–2021 dalam mendukung pencapaian misi ke 6 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016–2021.

Tabel 3.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024

No	PEMBANGUNAN	BASELINE 2019	SASARAN 2024
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
3	Lingkungan		
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	~ 26%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	66,5-68,5
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)

Sumber : Renstra KLHK 2020-2024

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket
I	Nasional		
3.	Pemerataan dan Kewilayahan	RKP 2019	
3.14	Desa dan kawasan pedesaan	RKP 2019	

3.14. 7	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan : 3. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim. 4. Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna.	RKP 2019	
III Provinsi			
1	Pembangunan agama dan budaya	RPJP Provinsi 2005-2025	
2	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005-2025	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005-2025	
4	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005-2025	
5	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005-2025	

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2023, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja DLH Tahun 2023

Visi Bupati : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”			
Misi II : Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah	Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3 di nagari 2. Peningkatan penyediaan sarana / prasarana pengelolaan sampah/LB3 3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup. 5. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6. Peningkatan pengembangan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah 7. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah dan penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penambahan sarana prasarana, pengembangan budidaya BSF untuk penangan sampah organik, optimalisasi peran dan keberdayaan bank sampah. 2. Penyediaan TPA Sampah yang representatif (Sanitary Landfill/ Control Landfill) dan pengembangan pengelolaan sampah pada TPA. 3. Penyediaan incinerator untuk pengolahan LB3. 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders. 5. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders. 6. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan pada umumnya dan isu persampahan/ Limbah B3 pada khususnya kepada sektor lain 7. Pengembangan penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif 8.

Misi III : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menetapkan kawasan konservasi/ pemeliharaan. 3. Mengendalikan mutu lokasi konservasi/ pemeliharaan. 4. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan 5. Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak 6. Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. 2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan. 3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya 4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi 5. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan. 6. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan 7. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan 8. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar. 9. Pencegahan terjadinya degradasi lahan 10. Penerapan teknologi pengelolaan limbah 11. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH 12. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan

**Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,22	68,20	68,74	69,27	69,81	70,34	70,87	70,87
	Indeks Kualitas Air	42,50	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29	56,29
	Indeks Kualitas Udara	93,86	90,23	90,34	90,45	90,55	90,65	90,75	90,75
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46,68	48,76	50,84	52,93	55,02	57,11	59,20	59,20
	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi terkait pelaksanaan Izin Lingkungan (IL)	92,86 %	92,95	93	94,75	96,5	98,25	100	100
	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100 %	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan & teknis penyimpanan sementara limbah B3	100 %	100	100	100	100	100	100	100
	Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS)	1 dokumen				1	1		2 dokumen
	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) & kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	0	0	3	5	7	9	13	13
	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12	15	15	18	25	28	34	34
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	27,58 %	28 %	28,25 %	28,5 %	29 %	29,25 %	29,5 %	29,5 %
3	Peningkatan Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3
	Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %	70 %	80 %	80 %

Sumber : Renstra DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis DLH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan mewujudkan Pasaman Barat yang bersih dari sampah yang diukur dengan persentase sampah yang tertangani.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DLH, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DLH Kab. Pasaman Barat Tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 9 program; 18 kegiatan dan 32 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kab. Pasman Barat pada tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp.7.044.454.173** (*Tujuh milyar empat puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang akan dialokasikan untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) program; 18 (delapan belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua).

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7,044,454,173					7,171,871,087			
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,933,431,950					5,081,434,908			
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35,116,200					36,872,010			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaam	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	35,116,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	36,872,010
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,327,833,595					4,329,739,652			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	39 Orang/bulan	100 %	4,110,450,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	100 %	4,103,239,652
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	138,383,095	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	100 %	147,000,000
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	100 %	79,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daera	100 %	79,500,000
2	11	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					64,722,500					70,849,153			
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Dokumen	589 unit	36,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	37,500,000
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	589 unit	27,822,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	33,349,153
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah					40,130,000					33,513,095			
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Level Maturitas SPIP Peningkatan Nilai SAKIP DLH Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bintek/Diklat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 BB 0 50 %	70 Orang	14 orang	40,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Maturitas SPIP Peningkatan Nilai SAKIP DLH Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	30 BB 0 50 %	33,513,095
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					225,379,655					243,285,343			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	5,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.0.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.0.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target					
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	40,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	27,500,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Laporan	100 %	155,379,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	170,285,343
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							74,000,000						88,000,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	57,000,000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	1 Laporan	100 %	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	31,000,000
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							166,250,000						279,175,655	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	37 Unit	57 Unit	91,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	100,000,000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	15 Unit	57 Unit	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	19,000,000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	34 Unit	57 Unit	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	41,000,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	100 %	2 Unit	57 Unit	16,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	119,175,655
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							438,988,850						152,887,735	
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							138,988,850						152,887,735	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.0.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.0.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur							
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya Dokumen RPPLH	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	138,988,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen RPPLH	1 Dokumen	152,887,735	
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							300,000,000						0		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen		300,000,000					0	
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							108,335,451						119,168,997		
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							108,335,451						119,168,997		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.99 dan 90.45 Indeks	1 Dokumen 6 lokasi	69.27 Indeks	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks		38,400,000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Pembinaan Program Kampung Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.99 dan 90.45 Indeks	1 Dokumen 3 lokasi	69.27 Indeks	11,835,451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks		10,018,997
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air dan Udara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.99 dan 90.45 Indeks	1 Dokumen	69.27 Indeks	62,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks		70,750,000
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							287,807,344						316,588,078		
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							287,807,344						316,588,078		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.7 Indeks 52.93 Indeks	46.7 Indeks	52.93 Indeks	287,807,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46.7 Indeks 52.93 Indeks		316,588,078
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							49,500,000						54,450,000		
2	11	05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3							49,500,000						54,450,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3 Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 93 %	1 Laporan	100 %	49,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3 Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	100 % 93 %	54,450,000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								114,950,000			126,445,000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								114,950,000			126,445,000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	3 Dokumen	93 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %	12,000,000
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti diklat PPLHD	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	1 Orang	93 %	15,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %	25,545,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	38 Laporan 49 objek	93 %	89,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %	88,900,000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								27,500,000			30,250,000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								10,000,000			11,000,000	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Angka 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	5 Angka 1 Dokumen	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH										17,500,000				19,250,000
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,27 0	1 Dokumen	1 Dokumen	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,27 0	19,250,000		
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										27,500,000				30,250,000
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										27,500,000				30,250,000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga pendidikan/filantropi dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Penghargaan 18 Penghargaan	18 Entitas	25 Penghargaan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan	25 Penghargaan 18 Penghargaan	30,250,000		
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										73,323,250				80,655,575
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										73,323,250				80,655,575
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	73,323,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	80,655,575	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										983,117,328				1,179,740,794
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah										983,117,328				1,179,740,794
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Persentase sampah yang tertangani	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	4 Kecamatan 28.5 %	48 Ton 28.5 %	28.5 %	983,117,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	4 Kecamatan 28.5 %	1,179,740,794	
TOTAL												7,044,454,173				7,171,871,087		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Padang Tujuh, Oktober 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pasaman Barat





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/583/BUP-PASBAR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Ketua
- 1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat 2023;
10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
11. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan

12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Simpang Empat
4 Oktober 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/503/BUP-PASBAR/2022
Tanggal : 4 Oktober 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Kepala Dinas	Pengarah
Sekretaris Dinas	Ketua
Perencana Ahli Muda	Sekretaris
Kasubag Keuangan	Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH)	Koordinator
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota
Kabid Penataan, Penaatan, Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas (P4LHPK)	Koordinator
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
Kabid Kebersihan dan Pertamanan	Koordinator
Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kepala Bidang Kehutanan	Koordinator
Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Staf Perencanaan	Sekretariat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

